

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian lapangan penulis disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 12 Batam berhasil. George Edward III antara lain menggunakan indikator untuk menilai proses PPDB sistem zonasi:

1. Pihak sekolah mensosialisasikan penerapan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi kepada seluruh masyarakat melalui website sekolah, dan papan pengumuman serta dengan membagikan tata cara pendaftaran di youtube. Tetapi sosialisasi itu belum sepenuhnya maksimal, beberapa orang tua calon peserta didik baru masih belum mengerti dengan penerapan sistem zonasi ini. Dan sekolah tidak memberikan informasi secara langsung kepada kelompok masyarakat.
2. Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 12 Batam ditinjau dari sumber daya manusia dan non manusia sangat memadai untuk mendukung semua kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, terlihat pertama dari terbentuknya tim panitia PPDB yaitu ketua , sekretaris, dan admin, kedua fasilitas tersebut cukup memadai yaitu memiliki ruang yang cukup untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan daya tampung siswa.

3. Disposisi dalam kegiatan PPDB ini sudah sangat baik dilihat dari sikap para panitia PPDB yang sangat transparansi dan berkomitment dalam menjalankan tugas-tugasnya.
4. Struktur birokrasi SMA Negeri 12 Batam dalam menerapkan sistem zonasi penerimaan siswa baru sudah cukup baik, dibuktikan dengan pembagian tugas di panitia PPDB yang dibagi tim-tim khusus. Dalam hal ini, masing-masing bidang diberi tugas sebagai panitia dalam pemilihan siswa baru.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil wawancara serta penelitian dan kesimpulan yang dilakukan, maka penulis memberikan beberapa sarann sebagai berikut:

1. Memaksimalkan pengabdian masyarakat dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru dengan meningkatkan pemahaman kemudian mengembangkan pelayanan untuk mengatasi permasalahan PPDB.
2. Menjadi tanggung jawab sekolah, khususnya kepala sekolah dan jajarannya, untuk memelihara dan mengoptimalkan kebijakan di lingkungan sekolah dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang merata kepada seluruh peserta didik, baik yang berkemampuan belajar tinggi, sedang, maupun lambat.